



MENUNTASKAN PERJANJIAN KERJASAMA EKONOMI SEBAGAI LANDASAN PERTUMBUHAN

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Survei Semesta Dunia Usaha: Menuntaskan Perjanjian Kerjasama Ekonomi sebagai Landasan Pertumbuhan	3
Indonesia Memperkuat Peran di Kawasan Lewat Kerjasama Ekonomi	5
Negara Prioritas bagi Indonesia dalam Menjalin Kerjasama Ekonomi	12

Survei Semesta Dunia Usaha: **Menuntaskan Perjanjian Kerjasama Ekonomi sebagai Landasan Pertumbuhan**



Photo by Farah Almazouni on Unsplash

Presiden Prabowo Subianto sadar bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Indonesia butuh hubungan bilateral dan multilateral yang berkualitas yang dapat meningkatkan surplus perdagangan dan investasi asing.

Penulis: **Tim Suar**

Bagaimana melihat gerak dan dampak dari upaya pemerintah menuntaskan perundingan-perundingan yang bertujuan memperkuat peran Indonesia di kawasan dan kerjasama ekonomi terekam dalam Survei Semesta Dunia Usaha yang dilakukan Tim SUAR.

Beberapa temuannya:

- Kesepakatan kerjasama multilateral dan bilateral yang dilakukan pemerintah menurut responden bermanfaat bagi perekonomian negara dalam banyak hal. Hal itu antara lain akan meningkatkan realisasi investasi (75%), meningkatkan kinerja ekspor (75%), serta menciptakan lapangan kerja (65,6%).
- Gaya komunikasi dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membahas kesepakatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain menumbuhkan apresiasi dan keyakinan responden bahwa ke depannya hal itu akan memperbesar aliran investasi yang masuk ke Indonesia dan membuat Indonesia lebih maju (65,6%).
- Indonesia terbuka dengan negara mana saja untuk menjalin kerjasama ekonomi. Hal itu diutarakan oleh empat dari sepuluh responden. Namun, dua negara menjadi prioritas mitra dagang atau mitra investasi yang lebih menguntungkan, yaitu Tiongkok (28,1%) dan Amerika Serikat (6,3%).

Tahun 2025 merupakan tahun sibuk pemerintahan Indonesia di meja perundingan untuk mencapai kesepakatan sejumlah kerjasama ekonomi yang telah dirintis sejak tahun-tahun sebelumnya.

Prestasi yang diraih terukir sejak awal tahun, dimulai saat Indonesia resmi bergabung dalam kerjasama negara-negara berkembang BRICS

(Januari). Disusul dengan perundingan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* antara Indonesia – Kanada dan Indonesia – Uni Eropa (September). Di pengujung tahun, ditandatangani pula Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Uni Ekonomi Eurasia atau I – EAEU FTA (Desember).

Negosiasi tentang tarif resiprokal dengan Amerika Serikat masih berlangsung dan ditargetkan kesepakatan perjanjian akan ditandatangani pada akhir Januari 2026. Indonesia mendapatkan pengecualian tarif bea masuk untuk sejumlah komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, teh, dan sebagainya. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan setelah pada Juli lalu AS menurunkan tarif terhadap produk Indonesia dari sebelumnya 32% menjadi 19%.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa kesepakatan yang berhasil diraih pemerintah akan berdampak pada meningkatnya realisasi investasi dan kinerja ekspor, serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Hal itu tidak lepas dari kesigapan presiden memanfaatkan forum-forum multilateral untuk menjalankan diplomasi ekonomi.

Ke depannya, Indonesia tetap terbuka dengan negara mana saja untuk menjalin kerjasama ekonomi. Meski, perlu memilih negara mana yang diprioritaskan menjadi mitra dagang atau mitra investasi dengan beragam pertimbangan.

Hingga saat ini, Tiongkok dan Amerika Serikat masih menjadi prioritas dalam kerjasama ekonomi Indonesia. Perluasan kerjasama ekonomi diperlukan untuk diversifikasi pasar ekspor dan menarik investasi, dua faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Indonesia Memperkuat Peran di Kawasan Lewat Kerjasama Ekonomi



Photo by Markus Krisetya on Unsplash

Sejumlah kesepakatan kerjasama multilateral dan bilateral berhasil dicapai pemerintah tahun ini. Mulai dari Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, penandatanganan perjanjian dagang dengan EU dan Kanada, hingga negosiasi tarif pajak resiprokal dengan AS yang akan difinalisasi akhir Januari 2026.

Penulis: **Gianie**

Tim SUAR menggali pemikiran para pengambil keputusan atau pemimpin di perusahaan serta pengamat ekonomi terkait dampak atau manfaat

kesepakatan dan kerjasama tersebut bagi kemajuan bangsa melalui Survei Semesta Dunia Usaha.

Highlight:

- Responden berpendapat bahwa tujuan utama pertemuan Presiden RI dengan pemimpin-pemimpin negara besar di dunia adalah untuk memperkuat peran Indonesia di kawasan (40,6%), meningkatkan kerjasama ekonomi (25%), dan mengundang investor (15,6%).
- Kesepakatan kerja sama multilateral dan bilateral yang dilakukan pemerintah menurut responden bermanfaat bagi perekonomian negara dalam banyak hal. Hal itu antara lain akan meningkatkan realisasi investasi (75%), meningkatkan kinerja ekspor (75%), serta menciptakan lapangan kerja (65,6%).
- Gaya komunikasi dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membahas kesepakatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain menumbuhkan apresiasi dan keyakinan responden bahwa ke depannya hal itu akan memperbesar aliran investasi yang masuk ke Indonesia dan membuat Indonesia lebih maju (65,6%).

Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto aktif melakukan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara besar di dunia. Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin (Juli 2024) dan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping (November 2024).

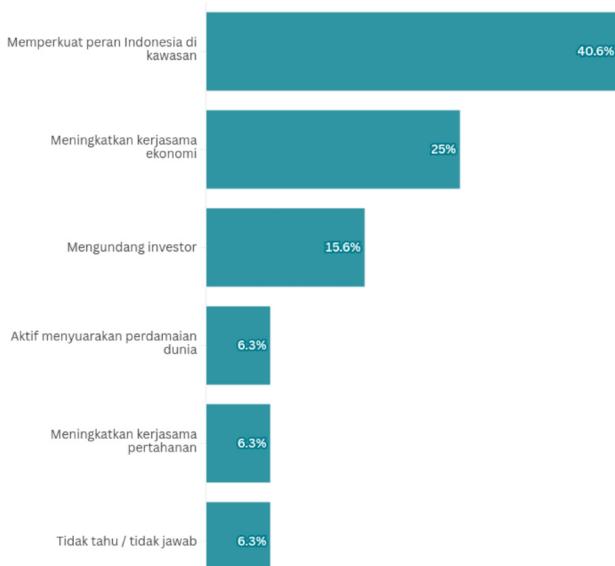
Di tahun 2025, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri India, Shri Narendra Modi (Februari 2025), dengan Presiden Perancis, Emmanuel Macron (Mei 2025), dengan

Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (Juli 2025), dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (September 2025).

Hasil Survei Semesta Dunia Usaha yang dilakukan Tim SUAR, responden melihat bahwa tujuan utama pertemuan-pertemuan penting itu titik beratnya adalah di bidang ekonomi, yaitu untuk memperkuat peran Indonesia di kawasan, terutama global, yang diutarakan oleh 40,6% responden, serta meningkatkan kerja sama ekonomi (25% responden) dan mengundang investor untuk masuk ke Indonesia (15,6% responden).

Tidak itu saja, juga ada tujuan lainnya, yaitu untuk secara aktif menyuarakan perdamaian dunia dan meningkatkan kerjasama bidang pertahanan. Hal ini sangat relevan di tengah situasi global yang masih diwarnai oleh konflik dan perang antarnegara.

Tujuan Utama Pertemuan Presiden dalam Hubungan Bilateral dan Multilateral



Kesepakatan Multilateral dan Bilateral

Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk meletakkan fondasi ekonomi yang kuat untuk bergerak lebih cepat di tahun-tahun berikutnya. Sejumlah pencapaian berhasil ditorehkan.

Di awal tahun, tepatnya pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi bergabung

dengan BRICS. Brasil sebagai Ketua BRICS 2025 mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS setelah mendapat persetujuan konsensus dari seluruh anggota. Selanjutnya Presiden Prabowo hadir dalam pertemuan BRICS pertamanya pada 6-7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu.

Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan persaingan kekuatan besar, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu kelompok saja. Dengan menjadi bagian dari BRICS, suatu negara dapat mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu dan menguatkan kerjasama antarnegara berkembang seperti BRICS. Pada tahun 2024, negara anggota BRICS berkontribusi pada lebih dari 40% populasi dunia dan 44% dari PDB dunia.

Tidak hanya menghadiri pertemuan BRICS, Presiden Prabowo selalu menyempatkan hadir dalam pertemuan multilateral lainnya, seperti APEC, G-20, ASEAN, dan D-8. Presiden Prabowo juga hadir dalam Sidang Umum PBB di New York pada 23 September 2025.

Dalam memperkuat kerjasama ekonomi secara bilateral, Indonesia pada 24 September 2025 menandatangi Perjanjian Indonesia – Kanada CEPA dan berlaku mulai tahun 2026. Indonesia telah

memulai perundingan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Kanada sejak tahun 2021 sebagai upaya untuk mendorong ekspor produk Indonesia dan mengurangi defisit neraca perdagangan dengan Kanada.

Dua hari sebelumnya, yakni pada 22 September 2025 dilakukan penandatanganan Perjanjian Indonesia – EU CEPA. Proses perundingan Indonesia – EU CEPA ini cukup alot terkait salah satu komoditas ekspor Indonesia dan telah berlangsung dalam sembilan tahun terakhir.

Ekspor utama Indonesia ke EU antara lain minyak sawit, bijih tembaga, dan lemak industri. Sementara Indonesia mengimpor kendaraan bermotor, mesin industri, dan obat-obatan dari EU. Adanya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) berdampak pada komoditas ekspor Indonesia ke EU. Dengan disepakatinya perjanjian Indonesia – EU ini, hasil ekspor Indonesia ke Uni Eropa, terutama bagi komoditas utama seperti sawit dan tekstil, diharapkan akan semakin baik.



Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Deputy Prime Minister the Republic of Belarus Viktor Karankevich (kiri) menyampaikan keynote speech pada Strategic Forum Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) di Jakarta, Senin (15/12/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

Pada tanggal 21 Desember 2025, ditandatangi pula Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Uni Ekonomi Eurasia atau I – EAEU FTA di St Petersburg, Rusia. EAEU merupakan organisasi kerjasama negara-negara Eurasia, seperti Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgistan yang dibentuk sejak 2014. Bagi Indonesia, perdagangan bebas dengan negara-negara Eurasia ini membuka peluang diversifikasi negara tujuan ekspor.

Terkait dengan hubungan dagang antara Indonesia – Amerika Serikat, saat ini negosiasi tentang tarif resiprokal sebesar 19 persen masih berlangsung dan ditargetkan

kesepakatan perjanjian akan ditandatangani pada akhir Januari 2026. Indonesia mendapat pengecualian tarif bea masuk untuk sejumlah komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, teh, dan sebagainya. Sementara itu, AS berharap mendapatkan askes terhadap sektor mineral kritis Indonesia.

Komoditas atau sektor-sektor yang mendapat tarif khusus ini merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan setelah pada Juli lalu AS menurunkan tarif terhadap produk Indonesia dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen.

Substansi perjanjian tarif antara RI - AS memasuki tahap penyelarasan bahasa hukum dan penyelesaian teknis dokumen.

Seluruh substansi perjanjian dagang RI – AS itu menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada prinsipnya telah disepakati. Selanjutnya pembahasan memasuki tahap penyelarasan

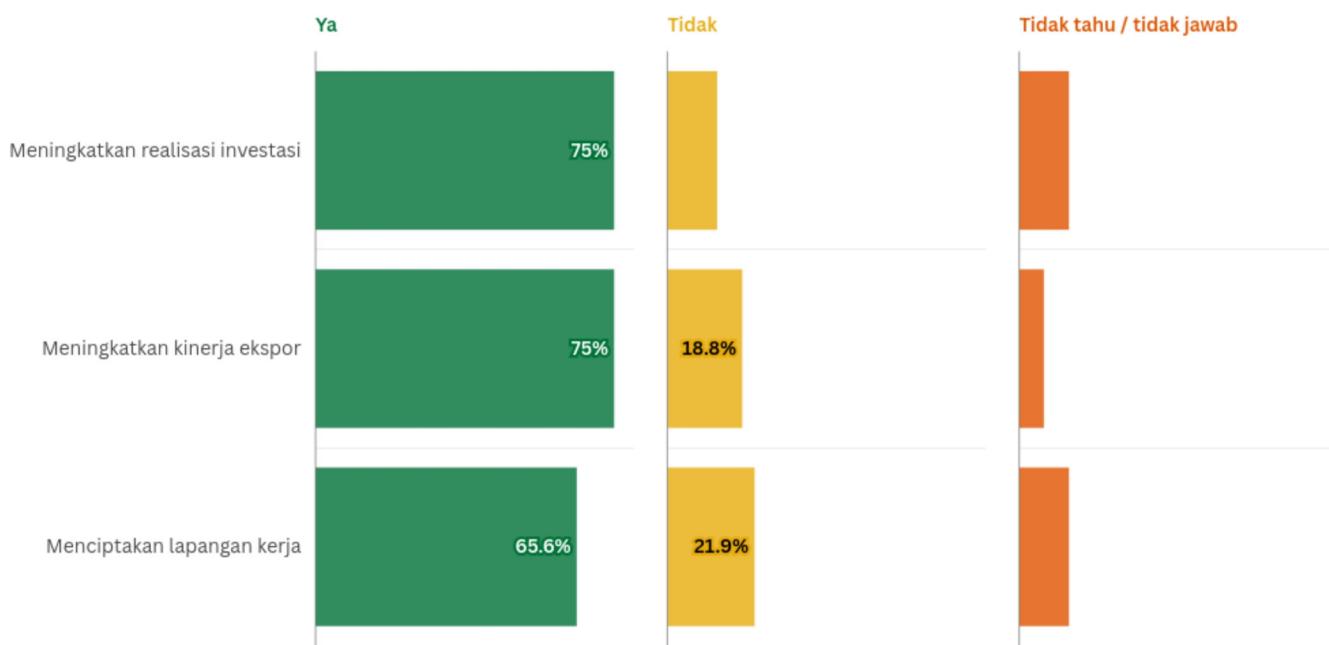
bahasa hukum dan penyelesaian teknis dokumen. Dokumen perjanjian rencananya akan ditandatangani langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Dampak Berganda dan Berkelanjutan

Kesepakatan atau perjanjian yang ditandatangani pemerintah ini dipandang responden memiliki dampak berganda (*multiplier effect*) untuk perekonomian. Sebagian besar responden menyatakan

bahwa kesepakatan tersebut dapat meningkatkan realisasi investasi Indonesia (75%). Selain itu, juga dapat meningkatkan kinerja ekspor (75%) dan menciptakan tambahan lapangan kerja di dalam negeri (65,6%).

Pendapat mengenai Dampak atau Manfaat Adanya Kesepakatan Ekonomi dalam 3 Aspek



n =32

Dari pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral yang sudah dilakukan, laporan Badan Komunikasi Pemerintah RI menyebutkan Presiden Prabowo berhasil mendapatkan komitmen investasi baru lebih dari Rp 1.000 triliun.

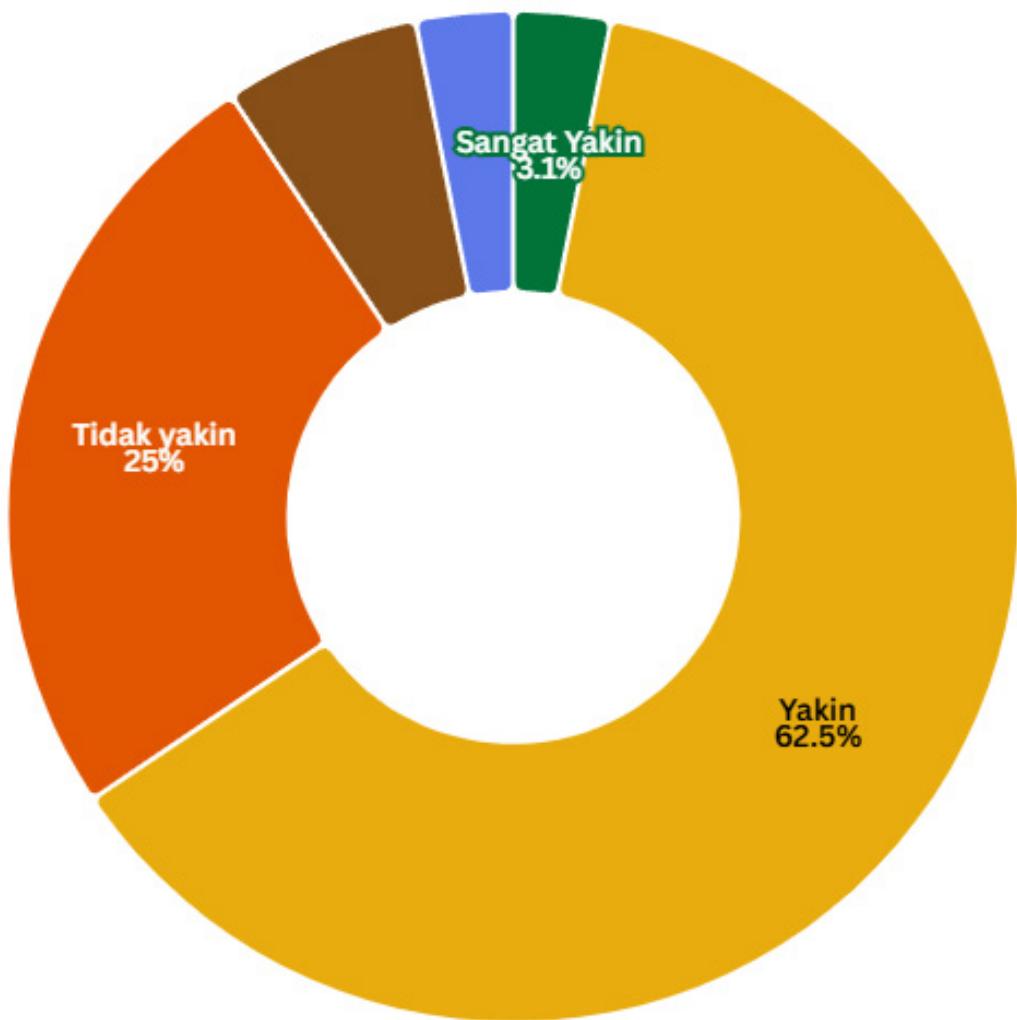
Implementasi dari kesepakatan-kesepakatan itu diharapkan dapat

meningkatkan realisasi investasi tahun-tahun ke depan. Secara kumulatif, realisasi investasi periode Januari-September 2025 mencapai Rp 1.434,3 triliun yang tumbuh 13,7% secara tahunan. Secara kumulatif hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Gaya komunikasi dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain menumbuhkan apresiasi dan keyakinan responden

bahwa ke depannya hal itu akan memperbesar aliran investasi yang masuk ke Indonesia dan membuat Indonesia lebih maju (65,6%).

Tingkat Keyakinan bahwa Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan Presiden Prabowo dalam melakukan pertemuan dengan pemimpin negara lain akan mendatangkan investasi dan membuat Indonesia lebih maju



Tidak hanya berdampak ganda, kesepakatan-kesepakatan itu diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk jalannya perekonomian secara berkelanjutan. Hal ini untuk

tujuan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengatasi masalah pengangguran yang saat ini tercatat sebanyak 7,4 juta jiwa.

Metodologi dan Profil Responden

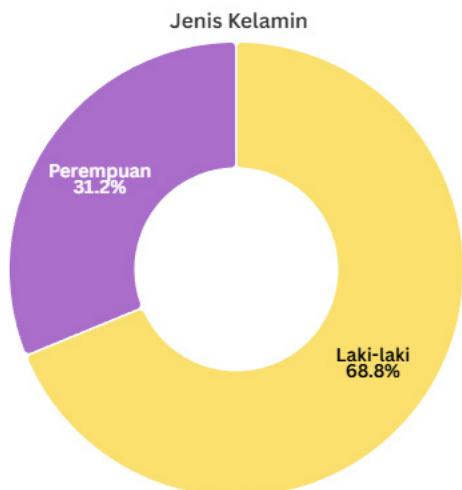
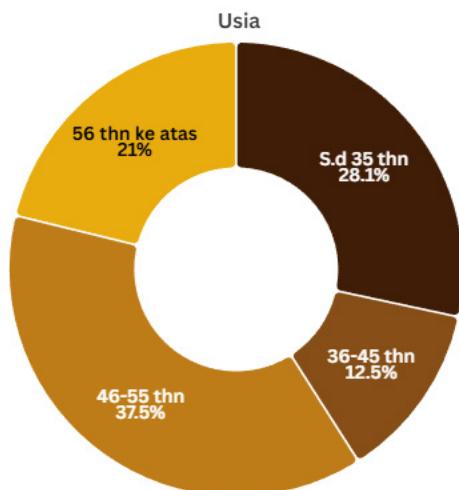
Survei Semesta Dunia Usaha dilakukan pada 5-25 November 2025. Sebanyak 32 narasumber (responden) dipilih secara *purposive sampling* dari kalangan dunia usaha dan pengamat ekonomi. Dari kalangan dunia usaha, posisi narasumber beragam, mulai dari direktur, direktur utama, hingga owner.

Dari segi pendidikan, responden adalah berpendidikan hingga S1 (50%) dan pascasarjana atau S2/S3 (50%).

Dari segi usia, jumlah narasumber responden yang berusia muda bertambah dengan komposisi berusia hingga 35 tahun sebanyak 28,1%, usia 36-45 tahun sebanyak 12,5%, usia 46-55 tahun sebanyak 37,5%, dan usia 56

Profil Responden

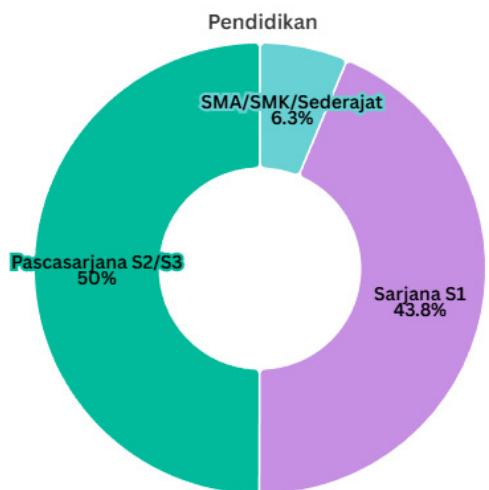
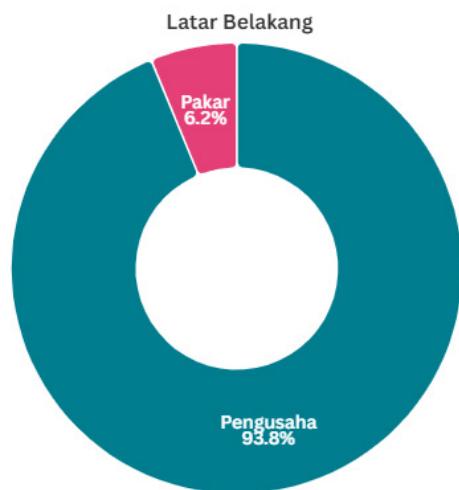
Enter series to show



n=32

Profil Responden

Enter series to show



n=32

Negara Prioritas bagi Indonesia dalam Menjalin Kerjasama Ekonomi



Photo by Markus Winkler on Unsplash

Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan negara prioritas bagi Indonesia dalam menjalin kerjasama ekonomi. Keduanya mitra utama dalam perdagangan dan investasi.

Penulis: **Gianie**

Perputaran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh hubungan baik dengan negara-negara yang menjadi mitra dagang dan mitra investasi. Untuk itu menjaga hubungan baik dengan negara sahabat merupakan aspek penting dalam diplomasi ekonomi. Terutama dengan Tiongkok dan Amerika Serikat yang menjadi mitra dagang utama Indonesia.

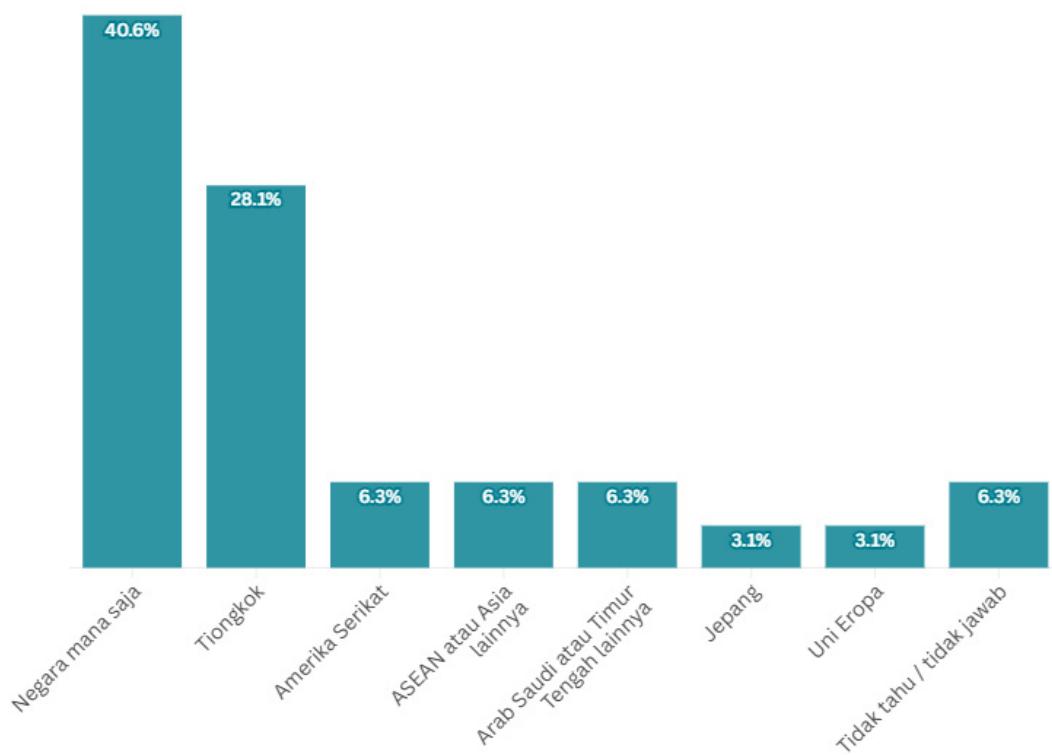
Indonesia terbuka dengan negara mana saja untuk melakukan kerjasama ekonomi, baik itu dalam konteks hubungan bilateral maupun multilateral. Untuk itu, Presiden RI Prabowo Subianto selalu menyempatkan hadir dalam pertemuan-pertemuan multilateral dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara sahabat di negaranya. Selain itu, Presiden Prabowo juga menerima sejumlah

pemimpin negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta atau di Istana Kepresidenan Bogor.

Dari pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral itu, Badan Komunikasi Pemerintah RI menyebutkan Presiden Prabowo berhasil mendapatkan komitmen investasi baru yang besarnya lebih dari Rp 1.000 triliun.

Dari Survei Semesta Dunia Usaha yang dilakukan Tim SUAR, dari responden survei yang terdiri dari para pemimpin di perusahaan dan pakar ekonomi menyampaikan Indonesia terbuka dengan negara mana saja untuk menjalin kerjasama ekonomi. Hal itu diutarakan oleh empat dari sepuluh responden. Namun, ada negara-negara yang dapat menjadi prioritas untuk dijadikan mitra dagang atau mitra investasi yang lebih menguntungkan.

Pendapat mengenai negara mana yang perlu diprioritaskan untuk kerjasama yang mendorong perekonomian Indonesia



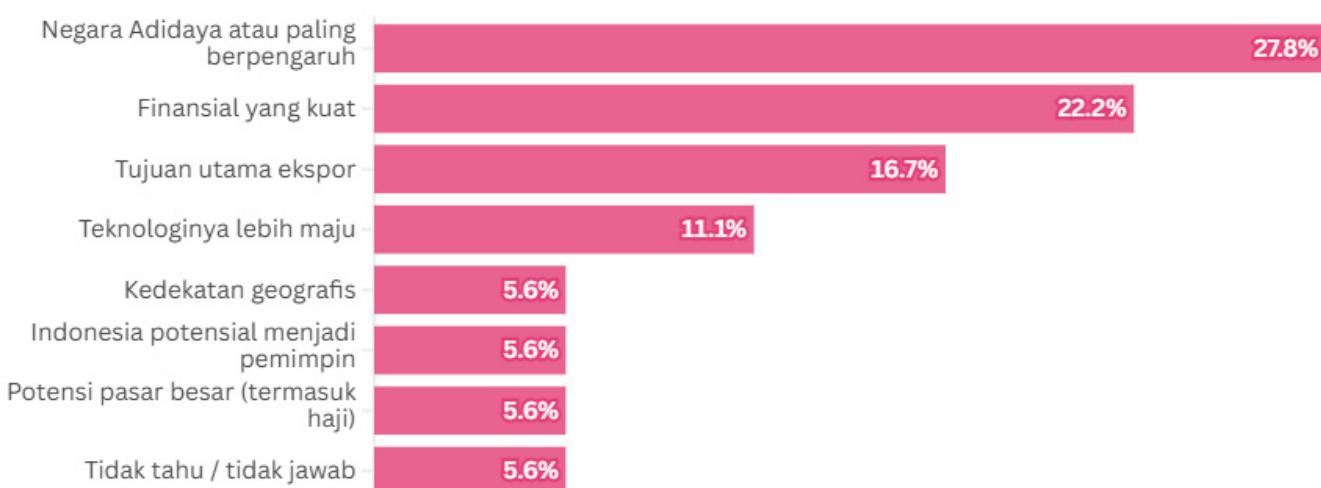
n = 32

Negara tersebut dengan persentase jawaban yang cukup besar adalah Tiongkok (28,1%). Setelah itu, dengan angka persentase yang sama, yaitu masing-masing 6,3%, berturut-turut adalah Amerika Serikat, negara-negara ASEAN atau Asia lainnya, dan Arab Saudi atau negara Timur Tengah lainnya.

Faktor yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menjalin

kerjasama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain adalah negara tersebut merupakan negara adidaya atau yang memiliki pengaruh besar dalam peta global (27,8%). Selain itu, memiliki kondisi finansial yang kuat (22,2%), merupakan negara tujuan utama komoditas ekspor (16,7%), serta memiliki teknologi yang lebih maju (11,1%) juga turut menjadi pertimbangan.

Faktor yang Dipertimbangkan dalam Memilih Negara untuk Kerjasama Ekonomi



n = 32

Tiongkok sebagai salah satu negara prioritas Indonesia dalam menjalin kerjasama ekonomi memiliki setidaknya dua faktor pertimbangan yang kuat, yakni salah satu negara adidaya atau berpengaruh kuat dan merupakan negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.

Disebut sebagai negara adidaya atau berpengaruh kuat, indikasinya terlihat dari Amerika Serikat yang menjadikan

Tiongkok sebagai pesaing terkuatnya dalam urusan dagang. Perang dagang antara kedua negara besar ini belum surut. Tarif impor AS terhadap produk-produk Tiongkok sempat mencapai 145%, meski kemudian turun menjadi 30% pada Mei 2025. Sebaliknya, tarif impor Tiongkok terhadap produk-produk AS sempat mencapai 125% sebelum akhirnya turun menjadi 10% pada Mei 2025.

Ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat bernilai 26,56 miliar dollar AS atau separuh dari ekspor ke Tiongkok.

Tiongkok sampai saat ini merupakan negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia terbesar. Selama periode Januari-Oktober 2025, ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok tercatat 52,45 miliar dollar AS. Angka ini mengambil porsi 23,51% dari total ekspor Indonesia dan tumbuh 1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, Amerika Serikat menempati posisi kedua sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, dengan nilai 26,56 miliar dollar AS (separuh dari ekspor ke Tiongkok) dengan porsi 11,5%.

Dua negara yang menjadi mitra dagang Indonesia ini memiliki catatan neraca perdagangan yang berbeda. Meski porsi terbesar ekspor Indonesia adalah ke Tiongkok, namun neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok selalu defisit karena impor dari Tiongkok lebih besar. Sementara neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dari tahun ke tahun selalu tercatat surplus bagi Indonesia. Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor AS ke Indonesia.

Dari segi investasi, di tahun 2025 (Januari-September) Tiongkok

merupakan negara dengan realisasi investasi terbesar ketiga dengan nilai 5,4 miliar dollar AS, setelah Singapura (12,6 miliar dollar AS) dan Hong Kong (7,3 miliar dollar AS).

Negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia merupakan mitra dagang dan mitra ekspor yang prioritas bagi Indonesia. Kedekatan geografis alias tetangga terdekat ini menjadi alasan terjalinnya kerjasama ekonomi.

Negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi juga menjadi negara prioritas bermitra dengan Indonesia. Hal itu karena penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menjadi pasar terbesar bagi Arab Saudi dalam ritual haji. Juga menjadi negara tujuan utama para pekerja migran Indonesia yang ingin memperbaiki nasib.

Meski ada negara-negara yang menjadi prioritas untuk menjalin kerjasama ekonomi, Indonesia tetap membuka peluang kerjasama dengan negara mana saja untuk diversifikasi pasar ekspor dan menarik investasi.



SUAR



Kontak : Marketing

📞 087784960904
👤 @suarinspirasi
✉️ office@suar.id

🌐 Suar Inspirasi Produktif
🔗 Suar Inspirasi Produktif
🌐 www.suar.id